



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR TA 2023

Mandala Harefa
Peneliti Ahli Utama
mandhar@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) fokus pada lima prioritas utama pada program kerja tahun anggaran (TA) 2023 mendatang dalam rangka mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur pascapandemi Covid-19. Lima prioritas utama program kerja tersebut didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang bertemakan Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, yaitu *multi years contracts*; pembayaran hutang pekerjaan; rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam; pembayaran eskalasi; serta tetap mempertahankan program pola padat karya.

Berdasarkan surat bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas serta surat Menteri Keuangan tanggal 18 April, ditetapkan pagu indikatif PUPR TA 2023 sebesar Rp98,21 triliun. Rincian pagu indikatif yang ditetapkan yakni Direktorat Bina Marga sebesar Rp40,2 triliun, Direktorat Sumber Daya Air Rp35,89 triliun, Cipta Karya Rp14,25 triliun, Direktorat Perumahan Rp5,94 triliun, Bina Konstruksi Rp530 miliar, dan keperluan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal serta badan lainnya Rp1,33 triliun.

Untuk pagu anggaran di bidang Bina Marga, terdiri dari pengerjaan infrastruktur jalan Rp22,4 triliun, jembatan Rp4,7 triliun, peningkatan aksesibilitas *underpass* hingga terowongan Rp460 miliar, peningkatan 15 km jalan bebas hambatan Rp2,5 triliun, serta preservasi rutin dan revitalisasi jalan hingga jembatan Rp7,7 triliun. Di bidang sumber daya air, dianggarkan untuk pembangunan bendungan dan danau Rp9,5 triliun, operasi dan pemeliharaan Rp7,99 triliun, pengadaan tanah Rp1,7 triliun, irigasi dan rawa Rp5,3 triliun, air tanah dan air baku Rp1,59 triliun, serta pengendalian daya rusak Rp6,3 triliun dan dukungan teknis Rp780 miliar. Sedangkan bidang Cipta Karya, rinciannya untuk air minum Rp3,5 triliun, sanitasi Rp3,2 triliun, penataan kawasan permukiman Rp1,28 triliun, bangunan gedung Rp1,60 triliun, sarana pendidikan Rp3,06 triliun, serta sarana olahraga dan pasar Rp330 miliar. Alokasi anggaran untuk sektor perumahan, terdiri dari pembangunan rumah susun Rp1,9 triliun, rumah khusus Rp400 miliar, rumah swadaya Rp2,72 triliun, rumah umum dan komersial Rp400 miliar, serta dukungan manajemen Rp520 miliar.

Selain itu, khusus untuk pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara Baru (IKN), Kementerian PUPR membutuhkan dana Rp43,73 triliun untuk membangun infrastruktur dasar di IKN Nusantara selama 2022-2024. Infrastruktur dasar tersebut antara lain seperti jalan tol, jalan nasional, kantor presiden dan wakil presiden, kantor kementerian, penyediaan air baku, dan drainase.

Program prioritas pembangunan infrastruktur nasional dan dan pagu indikatif tersebut harus sinkron dengan RKP Tahun 2023 termasuk Program Prioritas Nasional yang harus selesai tahun 2024. Kementerian PUPR harus menentukan skala prioritas pembangunan infrastruktur nasional dan sinkronisasi dengan pembangunan infrastruktur dasar di IKN. Upaya tersebut perlu dilakukan agar konektivitas dan sinkronisasi infrastruktur antar wilayah di Indonesia dapat terus berjalan di tengah keterbatasan fiskal negara. Dengan demikian, melalui pagu indikatifnya, Kementerian PUPR diharapkan fokus pada 5 program proyek yang sudah ada dan jika ada inisiatif perencanaan proyek baru perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara

Atensi DPR

Sejalan dengan program pembangunan infrastruktur, Kementerian PUPR telah memperoleh pagu indikatif tahun anggaran 2023. Dalam hal ini pihak DPR RI masih akan memperjuangkan penambahan anggaran untuk menutup *backlog* terhadap program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat sesuai mekanisme pembahasan anggaran 2023. Namun demikian, mengingat keterbatasan keuangan negara, tentunya DPR RI perlu menyarankan Kementerian PUPR untuk terlebih dahulu menyisir program yang menjadi prioritas utama dengan menyesuaikan pagu anggaran yang diberikan. Komisi V DPR RI berharap program prioritas yang berasal dari penyerapan aspirasi masyarakat pada saat kunjungan kerja dapat terealisasi.

Komisi V DPR RI sebaiknya lebih mendorong program pembangunan yang berskala nasional, termasuk program pembangunan yang merupakan aspirasi daerah. Hal ini penting sebagai upaya pemerataan pembangunan infrastruktur. Komisi V DPR RI juga harus mendorong Kementerian PUPR untuk dapat menambah alokasi program pembangunan infrastruktur padat karya dengan memberdayakan tenaga kerja dan penyedia jasa konstruksi lokal.

Sumber

Bisnis Indonesia, 14 Juni 2022;
Harian Ekonomi Neraca, 10 Juni 2022;
kompas.com, 10 Juni 2022;
kontan.co.id, 10 Juni 2022;
wartaekonomi.com, 10 Juni 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Riyadi Santoso
Ari Muliarta Ginting
Venti Eka Satya
Rafika Sari

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022